

SISTEM POLITIK DI INDONESIA

¹Syukron Abdul Kadir, ²Dian Kartikaningrum, ³Arifin Biramasi

Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Email: ¹syukronkadir@gmail.com, ²diankartikaningrum.85@gmail.com,
³araminbiramasi18@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat mulai menjadi lebih sadar politik sebagai akibat dari digitalisasi. dimainkan oleh penghibur politik atau penghibur di dalam otoritas publik itu sendiri. Contoh sederhananya adalah tersebarnya isu-isu berbeda sehubungan dengan istilah resmi: 'tiga istilah' pemberian bantuan sosial dan, yang mengejutkan, penundaan pemilu tahun 2024. Seiring dengan pesatnya laju demokrasi, sifat sistem politik menjadi semakin kacau akibat banyaknya kasus korupsi, banyaknya manuver politik yang dangkal, dan banyaknya perebutan kekuasaan yang ceroboh. Persoalan pemerintahan negara dalam desentralisasi dapat dikatakan bertumpu pada unsur-unsur kerangka politik.

Latar belakang sejarah permasalahan desentralisasi pemerintahan di Indonesia sejak otonomi mengungkap hubungan antar mitra. Kenyataan otentik menunjukkan bahwa hubungan negara dengan masyarakat umum dan tingkat demokratisasi merupakan elemen penentu dalam setiap model kerangka politik yang diambil. Penulis berpendapat bahwa agar suatu rezim dapat memilih sistem politik Indonesia yang sesuai dengan haknya, konsensus di antara para elit politiknya harus diperkuat, begitu pula partisipasi dan komitmen masyarakat terhadap pluralisme. Selain itu, peluang kerangka politik Indonesia ke depan adalah bertumpu pada generasi muda yang berperan besar dalam membendung kerangka oligarkis yang telah menjerat dan bahkan menjadi budaya yang mengganggu kemajuan bangsa. kerangka politik di Indonesia.

Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah studi tertulis dengan pendekatan tinjauan peraturan perundang-undangan. Informasi yang digunakan adalah sumber-sumber hukum esensial, pilihan, dan tersier yang dilengkapi dengan kajian-kajian tulisan penting. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara subyektif berdasarkan standar yuridis yang bersangkutan. Peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konteks hukum, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi normatif yang relevan dengan menggunakan metode kualitatif.

Kata kunci: desentralisasi; kerangka politik masyarakat umum; demokratisasi; Indonesia.

ABSTRACT

Society is starting to become more politically aware as a result of digitalization. played by political entertainers or entertainers within the public authority itself. A simple example is the spread of different issues regarding official terms: the 'three terms' of providing social assistance and, surprisingly, the postponement of the 2024 elections. As democracy accelerates, the nature of the political system becomes increasingly chaotic due to the many cases of corruption, the many political maneuvers superficiality, and many reckless power struggles. The problem of state governance in decentralization can be said to be based on elements of the political framework. The historical background to the problems of government decentralization in Indonesia since autonomy reveals the relationship between partners. Authentic reality shows that the state's relationship with the general public and the level of democratization are determining elements in each political framework model taken. The author believes that in order for a regime to choose an Indonesian political system that is in accordance with its rights, consensus among its political elites must be strengthened, as well as community participation and commitment to pluralism. Apart from that, the opportunity for Indonesia's political framework in the future rests on the younger generation who play a major role in stemming the oligarchic framework that has ensnared and even become a culture that disrupts the nation's progress. political framework in Indonesia.

The examination technique used is a written study with a review of statutory regulations. The information used is essential, selected and tertiary legal sources which are complemented by important written studies. The examination is carried out subjectively based on the relevant juridical standards. Researchers can gain a thorough understanding of the legal context, identify patterns, and draw conclusions based on relevant normative interpretations using qualitative methods.

Keyword: Decentralization; the political framework of the general public; democratization; Indonesia

PENDAHULUAN

Runtuhnya sistem tirani Permintaan Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya perubahan dalam pedoman politik Indonesia, dan dapat dilihat sebagai tahap awal yang melemahkan fungsi negara dari satu sudut pandang dan memperkuat kontrol budaya di sisi lain. Seiring dengan perubahan pedoman politik, keberadaan dan peran elit politik terdekat pada umumnya tidak sepenuhnya didukung dan bergantung pada negara. Dalam masa demokratisasi, mereka mempunyai peluang berharga untuk tidak lagi bertindak sebagai augmentasi negara (*focal Government*). Demikian pula, setelah perubahan, desain kerangka politik kita di Indonesia saat ini secara umum akan mengalami perubahan yang kuat. Kepentingan rakyat elit zaman semakin mempengaruhi perkembangan politik. Kelompok ideologi mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun kerangka negara yang kokoh. Pemerintahan yang baik akan tercipta jika iklim politik juga mendukungnya. Siklus pergantian penguasa di negara ini telah dimulai, seperti roda yang berputar. Berubah dari penguasa ke perlawanan atau sebaliknya. Hal ini berarti bahwa saat ini lingkungan politik publik

sangatlah unik. Bagaimana ini bisa terjadi? Partai politik, sebagai instrumen demokrasi, bersaing memperebutkan kekuasaan dalam suatu “ring” dan sesuai aturan yang telah ditentukan. Kontestasi mengharuskan partai politik mempertahankan fokus strategisnya. Pertemuan-pertemuan yang terjadi pada periode Permintaan Lama dan Permintaan Baru membentuk hubungan yang sangat mendalam dengan kerangka politik Indonesia. Pekerjaan kelas satu yang terlalu dominan membuat masyarakat lemah untuk mengembangkan diri dan terlibat dalam menciptakan kerangka politik yang stabil, bertentangan dengan norma, dan beberapa masalah yang menjengkelkan pun muncul. Masyarakat atau individu merupakan penentu bekerjanya suatu kerangka politik, karena masyarakat dipandang sebagai subjek dan objek kerangka politik yang berlaku. Negara dan bangsa Indonesia masih jauh dari kata memuaskan.

Transisi menuju sistem demokrasi sangat bergantung pada lima syarat berikut. Pertama, masyarakat umum yang bebas dan dinamis. Kedua, masyarakat politik, termasuk kelompok-kelompok ideologis terkemuka, pada umumnya bersifat independen. Ketiga, aparat keamanan. Keempat, birokrasi yang profesional. Kelima, perekonomian masyarakat yang relatif bebas dari negara dan pasar murni (Komara, 2015:122).

Metode Strategi pemeriksaannya adalah kajian tertulis dengan pendekatan tinjauan peraturan yuridis yang baku. Informasi yang digunakan adalah sumber-sumber hukum esensial, pilihan, dan tersier yang dilengkapi dengan kajian-kajian tulisan penting. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara subyektif berdasarkan standar yuridis yang bersangkutan. Peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konteks hukum, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi normatif yang relevan dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Munafrizal (2012), sistem politik demokratis dianggap mampu memfasilitasi partai politik yang independen, kompetitif, dan bebas beroperasi. Sistem politik harus dibuat demokratis terlebih dahulu sebelum partai politik bisa dibuat demokratis. Tanpa kerangka politik yang berdasarkan popularitas, maka tidak akan ada tantangan bagi munculnya kelompok-kelompok ideologis yang independen dan kejam. Kehidupan partai politik pada umumnya tidak bebas, otonom, atau kompetitif dalam sistem politik non-demokratis.

Salah satu hal yang perlu Anda ketahui tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mengetahui kerangka politik dan pemerintahannya. Anda wajib memahami sistem politik dan pemerintahan Indonesia sebagai warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Melalui perolehan tersebut diyakini akan memberikan kewaspadaan agar Indonesia terhindar dari situasi pemerintahan tirani yang mengekang hak warga negara untuk menjalankan aturan mayoritas dalam kehidupan bersahabat, bermasyarakat, dan bernegara (Sukoco, 2012: 2).

MENGUASAI KERANGKA SISTEM POLITIK

Sebelum melihat lebih jauh pentingnya kerangka politik, di Indonesia diartikan sebagai bermacam-macam atau seluruh kegiatan yang berbeda-beda dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk cara yang paling umum dalam menentukan tujuan, upaya untuk mencapai tujuan. mengetahui tujuan, arah, penentuan dan perencanaan skala kebutuhan. Permasalahan perundang-undangan adalah segala landasan negara dalam konstitusi negara (termasuk kewenangan, pemimpin, dan kemampuan hukum).

Untuk mempermudah tercapainya cita-cita dan tujuan suatu masyarakat atau bangsa, maka perlu dilakukan keseimbangan kekuasaan dan terjalannya kerjasama yang efektif antara infrastruktur politik dan suprastruktur ketika mengambil keputusan kebijakan. Untuk situasi ini, yang dimaksud dengan suprastruktur politik adalah Yayasan Negara. MPR, DPR, dan DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, semuanya diatur berdasarkan UUD 1945.

Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum akan diambil oleh lembaga-lembaga tersebut. Sejauh yang kita ketahui, sangatlah cerdas untuk mengetahui dua gagasan penting yang ada di dalamnya, yaitu kerangka kerja dan isu-isu pemerintahan itu sendiri. Meskipun ruang lingkup sistem di sini lebih kompleks, arti teknis dari kata tersebut adalah “cara” atau “metode”.

Secara umum, kita dapat mengartikan kerangka kerja yang membahas kesimpulan-kesimpulan yang berbeda sebagai suatu unit yang terdiri dari berbagai bagian (menghitung unit-unit utilitarian dan tugas-tugas luar biasa) yang saling berhubungan dan bersama-sama merencanakan untuk memenuhi interaksi tertentu. Pada dasarnya, kerangka kerja ini terdiri dari komponen-komponen spesifik yang saling berhubungan, saling mendukung dan mendukung dalam mencapai tujuan. Tergantung pada bagaimana para ahli memandang sistem sebagai objek formal, akan terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Kita mengambil contoh kerangka politik, kerangka sosial, kerangka moneter, keseluruhan rangkaian undang-undang, kerangka manajerial, dan lain-lain.

Gagasan mengenai isu-isu pemerintahan secara praktis setara dengan pentingnya kerangka kerja. Ada banyak implikasi mulai dari diperkenalkannya dunia sebagai negara kota di Athena (Polis) hingga pemahaman politik saat ini. Ditinjau dari sisi derivasinya, kata persoalan legislatif berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang mempunyai kedudukan seperti negara kota. Politik yang muncul di Yunani saat itu bisa saja diartikan sebagai suatu proses interaksi antar individu dengan individu lainnya dengan tujuan mencapai kebaikan bersama. Pemikiran yang berhubungan dengan politik banyak dipengaruhi oleh para filsuf Yunani Kuno, khususnya di dunia Barat.

Politik dipandang oleh para filsuf seperti Plato dan Aristoteles sebagai pencarian masyarakat politik yang ideal. Bagaimana pun, makna permasalahan perundang-undangan yang muncul akibat pemikiran para ulama ini belum mampu bermuara pada upaya akal sehat untuk mewujudkan bangsa yang baik. Namun harus diakui bahwa para filosof tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran politik kontemporer. Sepanjang masa perkembangannya, para peneliti politik menguraikan isu-isu legislatif secara khusus sehingga definisi yang berbeda-beda dapat membantu mempertimbangkan isu-isu pemerintahan.

Almond mengkarakterisasi isu-isu pemerintahan sebagai latihan yang berkaitan dengan pengendalian dinamika publik dalam suatu budaya tertentu di suatu daerah tertentu, dimana pengendalian tersebut dilakukan melalui instrumen-instrumen yang bersifat sah dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, politik erat kaitannya dengan pengambilan keputusan publik. Penekanan pada penggunaan instrumen yang sah dan bersifat memaksa secara terbuka berkaitan dengan siapa yang mempunyai kewenangan, bagaimana memanfaatkan kekuasaan tersebut, dan apa tujuan dari suatu pilihan yang disepakati. David Easton, sebaliknya, mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan hal-hal berbeda yang terhubung satu sama lain, bekerja sama, saling mempengaruhi, dan terikat oleh rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks. Sedangkan persoalan pemerintahan adalah kerja sama antara masyarakat dan otoritas publik dalam pengambilan keputusan dan strategi normal bagus di wilayah tertentu.

Politik, polisi, dan kebijakan semuanya merupakan turunan dari kata Latin polis yang berarti negara kota. Menurut Harold Laswell, persoalan legislatif adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Menurut David Easton, persoalan pemerintahan adalah pembagian nilai-nilai secara sah dan sesuai otoritas.

G.E.G. mengklaim bahwa Catlin, persoalan pemerintahan adalah kekuasaan dan memegang kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Joyce Mitchell, permasalahan legislatif merupakan arahan agregat atau pembuatan strategi umum bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut Jack Plano dkk, permasalahan pemerintahan adalah keistimewaan pengawasan, keahlian melakukan apa yang bisa dibayangkan, pemanfaatan dampak, perebutan kekuasaan dan pertentangan dalam pendistribusian nilai-nilai di arena publik (Budiardjo, 1991).

KERANGKA POLITIK HUBUNGAN DALAM SISTEM POLITIK

Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si dalam Easton, Suatu Sistem, Operasi. cit., hal. 69 hingga 75. Halaman-halaman ini menggambarkan iklim kerangka politik. Keterkaitan kerangka politik dalam situasi ini tidak bisa dilepaskan dari iklim kerangka politik itu sendiri. Lingkungan sistem politik berasal baik dari dalam sistem politik maupun dari luarnya. Dari luar kerangka politik seperti kerangka politik dunia, kerangka keuangan global, dan kerangka hubungan global. Sedangkan lingkungan hidup dalam sistem

politik itu sendiri, seperti sistem sosial, biologi, ekologi, ekonomi, hukum, administrasi, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan domestik adalah nama yang diberikan untuk sistem ini. Dalam istilah Almond, dua kondisi kerangka tersebut dikenal sebagai iklim intra budaya dan iklim ekstra budaya. Dalam kehidupan bernegara, kedua sistem lingkungan hidup tersebut di atas mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sistem politik.

PEMILU ATAU SISTEM PEMILIHAN UMUM

Pemilu berkaitan erat dengan demokrasi dan supremasi hukum. Partisipasi, keterwakilan, dan pengawasan melibatkan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan hakikat demokrasi. Salah satu ciri pemerintahan mayoritas berkuasa yang diungkapkan oleh N.D. Menurut Arora dan S.S. Awasthy, pemerintah harus bertanggung jawab kepada yang diperintah, dan yang diperintah atau setidaknya wakil dari yang diperintah harus dipilih. Yang lebih tegas lagi, A. Appadorai menyatakan bahwa cara mendasar yang digunakan individu untuk menjalankan kekuasaannya adalah melalui pemungutan suara dan keputusan (Gaffar, 2013).

Sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, masing-masing sistem pemilu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Praktisnya, yang sering menjadi persoalan bukanlah kerangka konstituen yang dipilih, melainkan cara pengambilan keputusan mulai dari penentuan peserta, panel, saksi, misi hingga ringkasan penghitungan suara. Selain persoalan sistem pemilu, penentuan hak pilih juga mendapat perhatian karena kaitannya dengan hak asasi manusia. Elemen Kerangka Politik Interpretasi dan Sistem Politik Protho dalam Sukarna (1979). Bukan berarti “kemampuan sosial”, namun lebih terkoordinasi pada arti “kemampuan pemerintah” yang berarti kemampuan pemerintah, sehingga ada unsur pencapaian tujuan. Memahami variabel-variabel sistem politik merupakan prasyarat untuk membahas fungsi sistem. Menurut Untari (2006:2), ada empat variabel dalam suatu sistem politik: Kekuasaan.

Dalam kerangka politik, kekuasaan bukanlah sebuah tujuan, kekuasaan adalah sebuah metode untuk mencapai hal-hal yang dibutuhkan oleh para penghibur politik. b Minat. Tujuan yang dikejar oleh aktor politik disebut kepentingan. c Wawasan. Efek lanjutan dari kolaborasi antara kekuasaan dan kepentingan. Legislasi biasanya merupakan cara sistem politik mengekspresikan kebijakan. d Budaya politik. Sikap subyektif seseorang terhadap sistem politik merupakan budaya politiknya. Menurut Laboratorium Pancasila, budaya politik adalah sikap politik yang khas terhadap sistem politik, berbagai komponennya, dan peran warga negara dalam sistem tersebut.

PERGESERAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Fakta bahwa hal ini telah terjadi menjadikan apa yang terjadi di Indonesia saat ini sebagai bukti nyata adanya perubahan dalam kerangka politik. Menurut hipotesis

Polybios, memang benar kekuasaan di Indonesia hanya terjadi pada perkumpulan-perkumpulan tertentu saja.

Politik pemerintahan terlihat jelas pada saat pengambilan keputusan daerah sedang berlangsung. Jenis sistem pemerintahan Penyelidikan terhadap kerangka politik menjadi lebih penting secara hipotetis, karena tidak ada satu pun kerangka politik suatu negara yang benar-benar setara dengan kerangka politik negara lain. Secara hipotesis, ada beberapa macam kerangka politik yang dikemukakan oleh Harold Crouh dalam Untari (2006) sebagai berikut: a. Shils, menurut Shils berbicara mengenai empat kerangka politik yang sedang mengalami modernisasi, khususnya:

DEMOKRASI DALAM SISTEM POLITIK

Pemerintahan sipil mencirikan demokrasi, seperti halnya lembaga perwakilan dan adanya kebebasan umum (hak-hak publik). Menurut Shils, kualitas sistem berbasis suara: (1) adanya pertemuan delegasi yang dipilih oleh individu, (2) ada lebih banyak daripada satu kelompok ideologi yang bersaing, (3) pers dan asosiasi yang berbeda mempunyai hak untuk berbicara secara bebas mengenai sudut pandang wacana/tawaran, (4) adanya kebebasan eksekutif yang sah, (5) hukum dan ketertiban tetap terjaga. Shils juga mengatakan bahwa sistem politik demokratis hanya bisa ada dalam “masyarakat politik” yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat, banyak perhatian politik dari masyarakat, pengakuan terhadap sistem yang sah, hak-hak individu, dan nilai-nilai yang disepakati. Menurut Shils, tidak ada satu negara pun yang memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan negara maju sekalipun. Baru-baru ini negara-negara Barat berusaha memenuhi persyaratan ini. 2) Sistem berbasis Tutelary Vote Kerangka ini antara lain digambarkan dengan: (1) adanya organisasi delegasi, (2) peluang Secara umum, (3) ada supremasi hukum, namun tidak terlalu kuat ; (4) Partai bebas dan pers diperbolehkan, namun pemerintah dapat menggunakan undang-undang untuk menghentikan kritik keras.

Menurut Kautsky

1) Metode Konvensional Kerangka politik semacam ini ada dalam budaya pra-modern, di mana terdapat tiga kelas utama, yaitu bangsawan, buruh, dan kelas pekerja lama (pengrajin, peneliti, dan pengirim barang). Darah biru kuat karena mereka mengendalikan sumber daya alam, khususnya tanah. Pertemuan ini memiliki posisi di pemerintahan, militer dan agama. Dahulu kala, kaum bangsawan memegang kekuasaan atas kelas menengah dan petani. Akibatnya, faksi-faksi kelas bangsawan lebih cenderung berselisih dalam konflik politik apa pun. Apabila terjadi penyesuaian kerangka, hal tersebut disebabkan oleh perubahan keuangan.

2) Kerangka 'Tirani

Kerangka ini tidak sama dengan kerangka tirani, khususnya kerangka dimana orang-orang yang memiliki pengaruh besar memanfaatkan teknik-teknik penting untuk mengimbangi kekuasaannya. Sementara itu, tatanan politik otoritarianisme berupaya mengendalikan masyarakat secara menyeluruh. Sistem tirani hanya memusnahkan saingan politik yang berisiko, namun Sistem ekstremis perlu mengontrol segalanya, bahkan agama, keluarga, olahraga, dll. Industrialisasi diperlukan agar totalitarianisme bisa terwujud karena kontrol total memerlukan senjata, organisasi, dan tingkat teknologi dan komunikasi modern.

3) Kerangka Despotisme Berdarah Biru Kerangka politik ini muncul ketika kelas-kelas terhormat memegang kekuasaan dan kelas-kelas lain dikucilkan dari otoritas publik. dengan memerintah secara totaliter. Hal ini terjadi jika kelas-kelas yang berbeda, misalnya buruh, kelas pekerja lama, peternak membutuhkan lebih banyak kekuatan dan tidak dapat mengatur pemerintahan mereka sendiri, sementara kelas industrialis lokal sangat tidak berdaya untuk membentuk suatu pemerintahan. Proses industrialisasi dan pergerakan nasional akan terhambat bila golongan bangsawan memegang kekuasaan. ancaman. Kekuatan kelas beradab bisa semakin berkurang, hal ini mungkin didukung oleh para industrialis untuk membentuk sistem ekstremis.

DEMOKRASI

Jika kita melihat awal reformasi, Amien Rais pernah membidangi fenomena Poros Tengah MPR. Pada saat itu, kekuatan aliansi yang disebut "Focal Pivot" mempunyai pilihan untuk membawa Gus Dur ke kastil. Pada saat itu, partai-partai besar digulingkan oleh "Poros Tengah", yang terdiri dari sekelompok partai "biasa-biasa saja". Partai Demokrat saat itu didukung oleh Partai Golkar, PKB, PKS, dan PAN, membentuk koalisi politik bahkan membentuk Sekretariat Bersama (Setgab) pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sebagai laboratorium strategi, Setgab menjadi sumber kebijakan Presiden saat itu. Demokrasi konstitusional merupakan salah satu konsep demokrasi yang berdampak pada sistem demokrasi Indonesia.

Kualitas sistem berbasis suara yang dilindungi adalah kemungkinan bahwa pemerintahan dengan aturan mayoritas adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan terbatas dan tidak diperbolehkan bertindak sembarangan terhadap warganya. Karena konstitusi membatasi kewenangan pemerintah, maka sering disebut sebagai pemerintahan konstitusional. Dengan demikian, pemerintahan yang mapan setara dengan pemerintahan yang dibatasi atau pemerintahan yang dikendalikan.

Dalam hal ini, ada dua jenis teori demokrasi yang dapat dipilih. Yang pertama adalah hipotesis pemerintahan aturan mayoritas prosedural menurut Robert A. Dahl. Bagi Dahl, kehidupan mayoritas tidak didorong oleh teknik atau strategi saja. Kontestasi dan partisipasi harus menjadi dua dimensi demokrasi yang terbaik. Jika persoalan perundang-undangan di Indonesia saat ini terkesan kusut, hal ini tak lain disebabkan oleh terpisahnya kerja politik dari norma-norma fundamentalnya. Arah politik tidak

lagi menjadi arena perebutan kendali, mengabaikan kata-kata mutiara utama sebagai sarana untuk mewujudkan manfaat hidup bersama. Meski kita masih bimbang apakah kita sedang hidup di era demokrasi atau tidak, kita masih begitu terhanyut dalam euforia demokrasi hingga saat ini. Pada mulanya, sistem pemerintahan mayoritas sebagai landasan kehidupan bernegara pada umumnya bertujuan agar pada tingkat terakhir individu memberikan keputusan terhadap persoalan-persoalan mendasar yang menyangkut kehidupannya, mengingat untuk mengevaluasi strategi-strategi pemerintahan negara mengingat pendekatan-pendekatan tersebut menentukan keberadaan individu. Selain itu, kerangka berbasis popularitas yang telah diperkuat melalui perubahan yang dilindungi harus disertai dengan kualitas etis atau energi untuk mewujudkannya oleh para eksekutif negara.

PENGARUH POLITIK MENGENALI KEKUASAAN

Para ahli politik telah lama menggunakan istilah “kekuasaan” karena kita menjumpai kekuasaan tidak hanya di suatu negara tetapi juga di dalam masyarakat. Menurut Poerwadarminta (1983: 529), kata dasar “kekuasaan” (mengatur, memerintah, dan sebagainya), kesanggupan, kesanggupan, dan kekuatan adalah makna yang diberikan pada kata “kekuasaan” dalam kamus. Sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” itu sendiri adalah: (1) kesanggupan atau kesanggupan (untuk menindaklanjuti sesuatu); (2) wewenang atas sesuatu atau memutuskan (meminta, menyampaikan, memberi hak, dan sebagainya) sesuatu; (3) orang perseorangan yang diberi kedudukan untuk memberikan hak (alamat, dan sebagainya); (4) cakap, bugar, kokoh; (5) dampak (keunggulan, ketergantungan, dan sebagainya) yang dimiliki seseorang karena kedudukannya (Poerwadarminta, 1983: 468).

Dengan melihat definisi di atas, kita dapat berasumsi bahwa kekuasaan mengandung tiga implikasi, yaitu: kapasitas, wewenang, dan dampak. Dari ketiga tujuan tersebut, makna kekerasan jelas terdapat pada definisi yang dikemukakan oleh Robert A. “Kekuasaan mencakup kategori hubungan manusia yang luas, misalnya hubungan yang mengandung pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuasaan politik.,” tulis Dahl pada tahun 1974: 407, mengacu pada kekuasaan.

Kemudian dalam bukunya “Analisis Politik Modern” ia menulis bahwa kekuasaan merupakan suatu bentuk pengaruh yang disertai dengan dorongan berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Karena pernyataan pertama, terdapat kontradiksi antara kedua pengertian istilah ini.

Gagasan tentang kekuatan bersifat umum karena mencakup berbagai hubungan manusia yang digabungkan dengan pengaruh dan dukungan. Karena istilah “kontrol”, “kekuasaan”, “otoritas”, dan “pengaruh” memiliki arti yang sulit untuk dipahami, Dahl tidak mempertanyakan hal tersebut. Karena adanya anggapan bahwa makna yang dimaksud dapat dipahami bersama, banyak pakar politik yang menggunakannya tanpa batasan. Pandangan komparatif disampaikan oleh Harold D. Lasswell (1950: 534)

bahwa: “kekuasaan sebagai hubungan antarmanusia seharusnya tidak salah lagi dan benar, didukung sebagai disiplin yang kejam”.

Perenungan Laswell secara tegas dikutip oleh Dahl dalam karyanya *“Power and Society”*, sebagai berikut: “Kekuasaan adalah contoh luar biasa dari aktivitas dampak, ini adalah cara paling umum untuk mempengaruhi strategi orang lain dengan bantuan (yang benar-benar dirusak) kesulitan serius karena ketidaknyamanan dengan strategi”.

Pendekatan psikologis terhadap kekuasaan mengidentifikasi pengaruh sebagai hakikat kekuasaan dari ungkapan di atas. Ancaman hukuman muncul setelah pengaruh yang dimaksud. Hal ini berarti bahwa dampak yang mungkin terjadi tanpa disertai bahaya tidak dapat diatur sebagai kekuatan. Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa ada dua komponen kekuasaan: aspek wewenang dan kemampuan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan gagasan politik, maka kekuasaan politik melakukan dua hal tersebut, khususnya meliputi kekuasaan dan kemampuan untuk menyelesaikan aktivitas politik.

Kita dapat dengan jelas memahami hakikat kekuasaan politik dalam kaitannya dengan definisinya dengan mempertimbangkan organisasi sistem politik suatu negara dan cara-cara yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan politik di dalamnya. Atribut-atribut ini adalah legitimasi, tanggung jawab, dan keragaman. “Legitimasi (legitimasi) adalah keyakinan anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang diarahkan kepadanya adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah menjadi tradisi dan pantas,” menurut Miriam Budiardjo (1982: 15).

Hal ini menunjukkan bahwa keaslian kekuasaan politik bergantung pada unsur-unsur pengakuan masyarakat dan pedoman hukum yang substansial, misalnya negara Indonesia yang mendeklarasikan otonominya pada tanggal 17 Agustus 1945. (F. 1982, Isywaro, hal. 59)

POLITIK DISTRIBUSI KEKUASAAN

Ada dua cara untuk melihat kekuasaan politik:

(a) pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan (b) pembagian kekuasaan antar lembaga pemerintah yang setingkat dan terlibat dalam fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, distribusi ini dapat disebut sebagai “kepemilikan kekuasaan” meskipun bersifat kualitatif dan secara teknis merupakan distribusi kuantitatif.

Sistem politik di Indonesia akan menghadapi tantangan meningkatnya institusionalisasi demokrasi, presidensialisme di bawah SPI (Sistem Politik Indonesia), dan modifikasi struktur kepemimpinan politik dan pemerintahan. Peluang kerangka politik Indonesia terletak pada generasi muda yang berperan penting dalam membatasi tatanan

paternalisme. dan pemerintahan yang sudah menjadi budaya dan dapat mengganggu kemajuan kerangka politik di Indonesia.

Menciptakan ruang politik yang sehat di media sosial, membentuk gerakan untuk menolak politisi jahat dari semua partai politik, dan merebut kepemimpinan politik yang bermartabat baik dalam gagasan maupun praktik dengan cara yang konstitusional merupakan strategi yang bisa dilakukan.

KESIMPULAN

Sistem politik demokratis dianggap mampu memfasilitasi partai politik yang independen, kompetitif, dan bebas beroperasi. Sistem politik harus dibuat demokratis terlebih dahulu sebelum partai politik bisa dibuat demokratis. Tanpa kerangka politik yang berdasarkan popularitas, maka tidak akan ada tantangan bagi munculnya kelompok-kelompok ideologis yang independen dan kejam. Kehidupan partai politik pada umumnya tidak bebas, otonom, atau kompetitif dalam sistem politik non-demokratis.

Demokrasi memungkinkan partai politik untuk berfungsi secara independen, kompetitif, dan bebas. Sebelum partai politik dapat beroperasi secara demokratis, sistem politik yang mendasarinya harus terlebih dahulu bersifat demokratis. Tanpa struktur politik berbasis popularitas, kelompok ideologis yang independen dan kejam tidak akan memiliki tantangan untuk muncul. Di sistem politik non-demokratis, partai politik biasanya tidak dapat beroperasi dengan bebas, mandiri, atau kompetitif.

Untuk memahami sistem politik Indonesia, penting bagi warga negara untuk memahami kerangka politik dan pemerintahannya. Pengetahuan ini membantu mencegah pemerintahan yang tirani dan mengekang hak-hak warga negara. Selain itu, pemilu yang demokratis dan supremasi hukum berperan penting dalam partisipasi publik dan pengawasan pemerintahan. Perubahan dalam sistem politik, baik dari luar maupun dalam, memengaruhi cara kekuasaan dijalankan, dan penting untuk menjaga keseimbangan antara infrastruktur politik dan suprastruktur dalam pengambilan keputusan.

Pemilu dan partisipasi politik yang bebas serta supremasi hukum adalah esensi dari demokrasi, memungkinkan rakyat untuk terlibat dalam pembentukan dan pengawasan pemerintahan. Pentingnya keseimbangan kekuasaan dan kerja sama antara infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia menunjukkan bagaimana perubahan dalam kerangka politik, baik dari dalam maupun luar, mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan. Dengan memahami sistem ini, warga negara dapat mencegah munculnya pemerintahan tirani yang membatasi hak-hak mereka.

Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia, tantangan utama adalah meningkatnya institusionalisasi demokrasi dan modifikasi struktur politik serta pemerintahan. Pemuda memiliki peran penting dalam membatasi budaya paternalisme dan pemerintahan yang menghambat kemajuan. Menciptakan ruang politik yang sehat di media sosial, menolak politisi jahat, dan merebut kepemimpinan politik yang bermartabat adalah langkah-langkah strategis untuk memajukan kerangka politik di Indonesia.

Meningkatkan institusionalisasi demokrasi dan merubah struktur kepemimpinan politik menjadi tantangan utama di Indonesia. Generasi muda berperan penting dalam mengurangi budaya paternalisme yang menghambat kemajuan politik. Langkah strategis meliputi menciptakan ruang politik yang sehat di media sosial, menolak politisi yang korup, dan merebut kepemimpinan politik yang bermartabat dengan cara yang konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa “*Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*”(Suatu Tela’ah Dari Sistem Politik) 281 Volume XXI No. 2 April – Juni 2005 : 262 – 285.
- Alil Rinenggo. *Prospek Sistem dan Budaya Politik di Indonesia* Jurnalwawasan Pengembangan Pendidikan, Vol. 10 No. 01 (April 2022) <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/Waspada>
- Budiardjo, Meriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Dahl, Robert A. 1974. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Printice-Hall of India Private Limited.
- Darma Djufri (91) *Sistempolitik danpemiludiindonesia* Jurnal INTELEKTIVA– VOL 3 NO 10 JUNI 2016.
- Deliar Noer dalam Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003 h. 2.
- Easton, A Framework, Op. cit., hal. 69 s/d 75. Pada halamanhalaman tersebut diuraikan mengenai lingkungan system politik.
- Isywar. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Angkasa
- Labolo,Muhadam Dr,Drs M.Si Dr. Averus,Ahmad S.STP., M.Si “*Sistem Politik Suatu Pengantar*” Cet I: (Desember 2022;22-23) CV Sketsa Media
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagraindo Persada, 2009, h..38
- Manik Sukoco, M. (2012). *Kajian sistem politik dan pemerintahan di Indonesia*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/288670683>
- Prayudi *Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara Di Tengah Hubungan Pusat-daerah Vol 19, No 4 (2014)*
- Suryo Gilang Romadlon *Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia* Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016 <http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/sistem-politik-indonesia.htm> 2015
- Yudi Latief, *Menuju Revolusi Demokratik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h. 110-111.